**Strategi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah****Siti Salamah[✉]**

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang

Info Artikel*Sejarah Artikel:*

Diterima Oktober 2017
Disetujui Desember 2017
Dipublikasikan Februari 2018

Keywords:

Strategy, APBD, Analytical Hierarchy Process, Central Java

Abstrak

Fenomena penumpukan penyerapan anggaran pada bulan Desember yang menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran merupakan salah satu problematika yang dihadapi oleh Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakmerataan penyerapan APBD serta menentukan strategi penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan AHP (Analytical Hierarchy Process). Informan dari penelitian ini terdiri dari 13 keyperson yang terdiri dari unsur akademisi/peneliti dan dinas pemerintah yaitu pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan pihak Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian dengan menggunakan AHP yaitu kriteria pertama adalah faktor regulasi, kedua kriteria faktor perencanaan anggaran, dan ketiga kriteria faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Alternatif prioritas program yakni diadakan sosialisasi mengenai mekanisme pencairan anggaran. Selanjutnya yaitu adanya RAB (Rencana Anggaran Biaya), serta adanya kebijakan penyerapan anggaran.

Abstract

The phenomenon of budget absorption in December that caused inequality of budget absorption is one of the problems being experienced by Central Java Province. The purpose of this study is to analyze the factors causing inequality absorption of APBD and the speed of absorption of Central Java Provincial Government's APBD. This type of research is descriptive qualitative research with data analysis technique used in this research is descriptive analysis and AHP (Analytical Hierarchy Process). Informants from this research consists of 13 keyperson consisting of academician/researcher and government institution that is Financial and Asset Management Board of Central Java Province and the Regional Administration Bureau of Central Java Province. The result of research using AHP is first criterion is regulation factor, second criterion of budget planning factor, and resource factor. Alternative program of socialization program on budget disbursement mechanism. Furthermore, the existence of RAB (Budget Plan), and the budget absorption budget..

© 2018 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

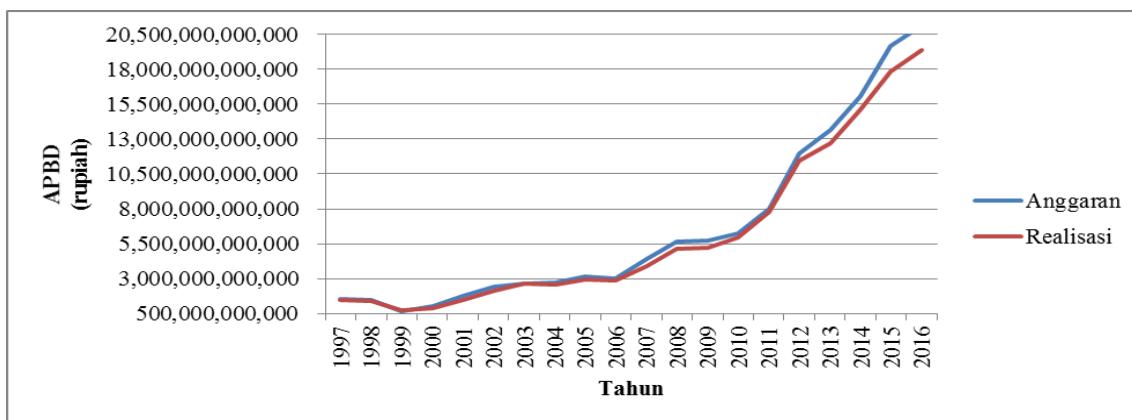
Ruang Jurnal Gedung L FE UNNES, Sekaran Gunungpati
Semarang, 50229, Indonesia
E-mail: sitisalamah399@gmail.com

ISSN 2252-6965

PENDAHULUAN

Fenomena penumpukan penyerapan anggaran pada bulan Desember yang menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran mengakibatkan polanya tidak optimal karena penyerapan anggaran rendah pada awal dan menumpuk pada akhir tahun. Rendahnya penyerapan anggaran merupakan masalah

klasik. Akan tetapi, permasalahan ini tidak dapat dianggap "remeh" karena jelas permasalahan ini dapat menghambat proyek yang ada dan pada akhirnya dapat mengganggu laju pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Rendahnya penyerapan anggaran menjadi perhatian serius (agenda setting) pemerintah karena telah berdampak kepada perlambatan perekonomian nasional.



Gambar 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2016

Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan grafik 1 dapat disimpulkan bahwa antara anggaran dan realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, jika dilihat pada tahun 2015 APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki selisih terbesar antara anggaran dan realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal itu menunjukkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak mampu mencapai anggaran pendapatan yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya dan hal tersebut juga menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan antar daerah secara proporsional, adil, demokratis dan transparan. Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti

dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah (Pujiati, 2008).

Permasalahan lemahnya perencanaan anggaran bukan merupakan satu-satunya permasalahan di penyerapan anggaran akan tetapi ada permasalahan regulasi. Permasalahan regulasi ini terkait dengan peraturan pemerintah pusat maupun peraturan daerah. Pada tahun 2015 ada permasalahan regulasi yang terjadi di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yaitu pada pasal 298 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menggantikan regulasi yang sama yaitu Undang-Undang 32/199 sehingga untuk bisa mencairkan dana hibah ini maka lembaga atau organisasi kemasyarakatan harus mengurus legalitas di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Regulasi tersebut jelas mengganggu pencairan anggaran karena yang seharusnya dana hibah tersebut sudah dapat direalisasikan pada awal tahun tetapi karena ada regulasi tersebut maka pencairan dana menjadi

terhambat dan menunggu lembaga atau organisasi kemasyarakatan sampai sudah berbadan hukum. Semenjak ada regulasi tersebut maka pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa selain mematuhi ketentuan yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah pusat daripada harus tersangkut persoalan hukum. Menurut Ganjar Pranowo, sebenarnya syarat penerima dana hibah relatif mudah tetapi sejak penerapan UU No. 23/2014 ada syarat tambahan yang harus dipenuhi, yaitu penerima dana hibah adalah badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum (bisnis.com, Senin 27-07-2015).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada saat itu mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) yang bersumber pada APBD. Menurut Anggota DPRD Jawa Tengah Akhsin Makruf mengharapkan agar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak perlu ragu dalam menyalurkan Hibah dan Bansos mengingat petunjuk teknis berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri sudah ada. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dijelaskan bahwa untuk organisasi masyarakat atau yayasan harus berbadan hukum, sedangkan untuk mushola dan masjid cukup dengan pengesahan yang dilakukan oleh kepala daerah setempat. Sedang untuk dua organisasi besar seperti Muhammadiyah dan NU tidak perlu lagi berbadan hukum. Penyaluran bantuan kemasyarakatan dalam bentuk Hibah dan Bansos Pemprov Jateng sejak keluarnya UU No 23/2014 mengalami penyusutan. Hal tersebut dikarenakan masih sedikit kelompok masyarakat yang mengajukan proposal bantuan belum memiliki badan hukum yang disyahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (beritajateng.net, Kamis 28-07-2016). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa banyaknya dana hibah yang tidak bisa dicairkan karena adanya overlapping regulasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang menyebabkan penyaluran dana hibah yang terhambat sehingga penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi rendah.

Penumpukan penyerapan anggaran di Provinsi Jawa Tengah yang menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran tidak hanya disebabkan oleh lemahnya perencanaan anggaran dan regulasi saja akan tetapi kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi salah satu penyebab ketidakmerataan penyerapan anggaran. Salah satu cara untuk melihat kualitas SDM Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan melihat kualifikasi pendidikan umum yang ditempuh oleh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, dominasi pendidikan yang ditempuh oleh PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terbanyak yaitu S1 (Strata 1) sebanyak 27.451 orang atau hampir 61% sedangkan hampir 5.799 orang atau sekitar 13% merupakan lulusan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) bahkan masih ada lulusan SD (Sekolah Dasar) sebanyak 546 orang yang bekerja sebagai PNS di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ada PNS yang berpendidikan rendah yang bekerja sebagai PNS di Provinsi Jawa Tengah. PNS yang hanya menempuh jenjang pendidikan sampai tingkat SD ada kemungkinan bahwa PNS tersebut memiliki usia diatas 40 tahun dan termasuk dalam golongan usia yang kurang produktif jika dibandingkan dengan PNS yang lulusan S1 dan termasuk dalam golongan usia yang masih produktif.

Kenyataan bahwa masih banyak PNS yang memiliki usia diatas 40 tahun tetapi masih dipekerjakan maka dapat disimpulkan bahwa rendahnya penyerapan anggaran juga dapat disebabkan karena masih rendahnya kualitas SDM pada bagian pelaksana kegiatan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang disebabkan karena jenjang pendidikan PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masih rendah sehingga dikhawatirkan etos kerja dari PNS yang belum menunjukkan semangat profesional. Demokratisasi menurunkan pengeluaran untuk pertahanan, walaupun hasil estimasi faktor instrumental tidak signifikan (Kotera & Keisuke, 2017)

Pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa

dominasi usia PNS yang ada di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah berusia 51 tahun sampai dengan 55 tahun sejumlah 12.054 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada 12.054 orang atau 27% dari keseluruhan jumlah PNS di Provinsi Jawa yang sudah memasuki usia yang kurang produktif tetapi masih dipekerjakan sebagai PNS. Apabila dibandingkan antara PNS yang termasuk dalam golongan usia yang masih produktif dengan PNS yang sudah memasuki usia kurang produktif yaitu sebanyak 9.965 orang atau 22,4% merupakan PNS yang berusia produktif sedangkan sebanyak 34.511 orang atau 77,6% PNS sudah memasuki usia kurang produktif. Sehingga perlu adanya regenerasi PNS yang ada di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah karena terkait dengan ketidakmerataan penyerapan APBD sebagai akibat dari rendahnya penyerapan APBD pada bulan Januari dan menumpuknya penyerapan APBD ketika menjelang akhir tahun yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. siklus anggaran politik dapat dihasilkan dari lembaga fiskal yang menciptakan batasan anggaran yang lunak: yaitu, di mana calon dan pemilih rasional dapat memperkirakan bahwa biaya pemilihan akan ditutup sebagian oleh pemerintah pusat (Baskaran, et al., 2017)

Permasalahan penumpukan anggaran ini tidak terlepas dari penyerapan anggaran yang kurang optimal yaitu penyerapan anggaran pemerintah daerah yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun anggaran merupakan penyerapan anggaran yang kurang baik dilihat dari sisi perencanaan pemerintah daerah. Selain itu tidak sesuai dengan harapan pemerintah bahwa proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran seharusnya dapat berlangsung tepat waktu, lebih merata dan memberikan multiplier effect yang besar kepada kegiatan perekonomian. Kegagalan target penyerapan anggaran memang berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan, yang artinya terjadi idle money. Menurut pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah bahwa batasan idle money yang dapat ditoleransi yaitu sebesar 5% sehingga terjadi penumpukan penyerapan anggaran pada bulan Desember. Penyerapan anggaran yang rendah menunjukkan adanya permasalahan yang serius di kalangan pengguna anggaran, yang selalu saja terulang setiap tahun, khususnya persoalan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Rozai, 2015).



Gambar 2. Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2015

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diolah

Berdasarkan grafik 2 terdapat permasalahan penyerapan APBD yang cenderung fluktuatif setiap bulannya yang menunjukkan bahwa perencanaan yang kurang matang dalam penentuan anggaran yang akan dialokasikan akan berdampak pada minimnya penyerapan anggaran disetiap bulannya. Selain itu, pada grafik 2 juga terlihat permasalahan lain yaitu penumpukan penyerapan APBD pada akhir tahun atau pada bulan Desember dari

penyerapan APBD yang berakibat pada hilangnya manfaat belanja karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan secara merata artinya terjadi idle money yang menurut pihak BPKAD Provinsi Jawa Tengah memiliki batas toleransi sebesar 5%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab ketidakmerataan penyerapan APBD dan menentukan strategi penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sesuai untuk mengatasi permasalahan terkait penyerapan APBD tersebut. Selain itu, perbedaan yang signifikan muncul pada perubahan tingkat pengeluaran dan struktur tergantung pada lokasi rumah tangga (Nicholas & Pele, 2017)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari informan kunci (keyperson) yaitu dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, pihak Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan pihak akademisi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelaah studi-studi dokumen yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti yang bersumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, dan Badan

tahun 2012-2015 yang menyebabkan ketidakmerataan penyerapan APBD pada tahun-tahun tersebut.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat diulas kembali bahwa pemerataan penyerapan APBD dapat memberikan multiplier effect yang besar kepada kegiatan perekonomian. Namun pada pelaksanaannya penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih mengalami permasalahan ketidakmerataan. Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. 1) Observasi yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan cara survey ke lapangan. 2) Wawancara yaitu melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak instansi yang berwenang mengenai pelaksanaan penyerapan anggaran instansi. 3) Kuesioner adalah mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan tertulis berupa kuesioner AHP kepada keyperson untuk dijawab. 4) Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa data-data dari laporan bulanan penyerapan anggaran yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan teknik Analytical Hierarchy Process (AHP). Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakmerataan penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi maka diperoleh data-data mengenai permasalahan tersebut. Sedangkan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu menentukan strategi penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui kuesioner yang diberikan kepada keyperson yang telah ditentukan dan memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mengatasi permasalahan terkait penyerapan APBD..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan pengumpulan data dapat diketahui faktor-faktor penyebab ketidakmerataan penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu dari faktor perencanaan anggaran, faktor regulasi, dan faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga dari faktor-faktor tersebut dibuat strategi untuk pemerataan penyerapan APBD yaitu: (1) Faktor perencanaan anggaran terdiri dari adanya RAB (Rencana Anggaran Biaya), adanya KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan diadakan pelatihan pembuatan RAB (2) Faktor regulasi meliputi adanya kebijakan penyerapan anggaran, diadakan sosialisasi mengenai mekanisme pencairan anggaran, dan adanya kebijakan yang mengatur penerbitan SK (3) Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri dari adanya pelatihan rutin untuk pejabat pelaksana anggaran, adanya

komitmen dari pejabat pelaksana anggaran, dan adanya sanksi bagi pejabat yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu.

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang akan dijadikan kriteria dan dari kriteria tersebut kemudian dijadikan beberapa alternatif untuk menentukan strategi penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui bantuan dari keyperson yaitu pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dan pihak Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan rating dan pembobotan pada setiap kriteria dan alternatif yang telah dibuat, maka dapat dilakukan analisis AHP (Analitycal Hierarchy Process) untuk strategi penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Setiap faktor yang dipertimbangkan dalam program pemerataan penyerapan APBD beserta nilai bobotnya disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kriteria Penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

| No | Program | Nilai Bobot | Keterangan |
|----|-----------------------------|-------------|------------------------------|
| 1 | Faktor Perencanaan Anggaran | 0,386 | <i>Inconsistency Ratio</i> = |
| 2 | Faktor Regulasi | 0,434 | 0,01 |
| 3 | Faktor Sumber Daya Manusia | 0,181 | |

Sumber: Data Primer diolah, 2017

Hasil AHP (Analitycal Hierarchy Process) pada tabel 1 diperoleh dari keyperson yang telah dipilih. Hasil olah data AHP digunakan untuk menentukan faktor mana yang menjadi prioritas dan memberikan informasi mengenai faktor apa saja yang harus diperbaiki atau dikembangkan guna strategi penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Langkah selanjutnya

strategi penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan berikutnya adalah kriteria faktor perencanaan anggaran (Nilai bobot 0,386), dan di tempat terakhir merupakan kriteria faktor Sumber Daya Manusia (Nilai bobot 0,181). Nilai inconsistency ratio $0,01 < 0,1$ (batas maksimum) yang berarti hasil analisis tersebut dapat diterima.

Hasil analisis AHP dari alternatif-alternatif secara keseluruhan menunjukkan

bahwa adanya kebijakan penyerapan anggaran merupakan alternatif prioritas utama jika

yang faktor-faktor yang menjadi kriteria dari yang paling prioritas hingga yang tidak prioritas akan diuraikan ke dalam sebuah alternatif-alternatif dari masing-masing faktor.

Berdasarkan pendapat gabungan dari para keyperson menunjukkan bahwa kriteria faktor regulasi (Nilai bobot 0,434) merupakan kriteria paling penting yang perlu diperhatikan dalam dibandingkan dengan alternatif-alternatif lain guna strategi penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Secara keseluruhan hasil analisis AHP dapat dilihat pada tabel 2

Berdasarkan tabel 2 maka dapat dibuat strategi untuk penyerapan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu: (1) Diadakan sosialisasi mengenai mekanisme pencairan anggaran yang selama ini kebijakan mengenai mekanisme pencairan anggaran dari pemerintah

provinsi atau pemerintah daerah sering mengalami perubahan tetapi belum pernah diadakan sosialisasi mengenai mekanisme pencairan anggaran yang menyebabkan pejabat pelaksana anggaran kurang mengetahui cara mencairkan anggaran (2) Adanya RAB (Rencana Anggaran Biaya) disebabkan karena ada beberapa OPD yang tidak membuat RAB untuk melaksanakan kegiatan atau program (3) Adanya kebijakan penyerapan anggaran karena selama ini tidak ada kebijakan yang mengatur mengenai besaran atau persentase penyerapan anggaran setiap bulan/triwulan/kuartal/semester yang harus dicapai oleh OPD (4) Adanya KAK (Kerangka Acuan Kerja) disebabkan masih ada beberapa OPD yang tidak berpedoman pada KAK dalam melaksanakan kerjasama kegiatan/program kerja dengan pihak ketiga (5) Adanya kebijakan yang mengatur penerbitan SK karena masih seringnya terjadi keterlambatan penetapan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK)

atau Pejabat Pelaksana Anggaran (PPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) akan menyebabkan keterlambatan penerbitan SK pejabat tersebut (6) Adanya komitmen dari pejabat pelaksana anggaran disebabkan seringnya pejabat tersebut berpindah-pindah OPD (7) Diadakan pelatihan pembuatan RAB karena kenyataan bahwa seringnya OPD melakukan revisi RAB setiap tahunnya dan pelatihan pembuatan RAB tersebut juga belum pernah dilakukan (8) Adanya pelatihan rutin untuk pejabat pelaksana anggaran karena pejabat pelaksana anggaran memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keahlian teknis dalam proses penatausahaan keuangan daerah yang berbeda-beda (9) Adanya sanksi bagi pejabat yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu disebabkan banyak pejabat pelaksana anggaran yang sering menunda-nunda pekerjaan dan kurang disiplin dalam menyelesaikan tugasnya.

Tabel 2. Urutan Alternatif Strategi Penyerapan APBD dari yang Paling Prioritas

| Kriteria Program | Nilai Bobot | Keterangan |
|---|-------------|-----------------------------|
| Diadakan sosialisasi mengenai mekanisme pencairan anggaran | 0,183 | Faktor Regulasi |
| Adanya RAB (Rencana Anggaran Biaya) | 0,162 | Faktor Perencanaan Anggaran |
| Adanya kebijakan penyerapan anggaran | 0,150 | Faktor Regulasi |
| Adanya KAK (Kerangka Acuan Kerja) | 0,148 | Faktor Perencanaan Anggaran |
| Adanya kebijakan yang mengatur penerbitan SK | 0,123 | Faktor Regulasi |
| Adanya komitmen dari pejabat pelaksana anggaran | 0,076 | Faktor Sumber Daya Manusia |
| Diadakan pelatihan pembuatan RAB | 0,064 | Faktor Perencanaan Anggaran |
| Adanya pelatihan rutin untuk pejabat pelaksana anggaran | 0,052 | Faktor Sumber Daya Manusia |
| Adanya sanksi bagi pejabat yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu | 0,042 | Faktor Sumber Daya Manusia |

Sumber : Data Primer diolah

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: (1) faktor-faktor penyebab ketidakmerataan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah yaitu berkaitan dengan faktor perencanaan anggaran, faktor regulasi, dan faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Strategi yang diberikan terkait permasalahan pada faktor perencanaan anggaran yakni adanya RAB (Rencana Anggaran Biaya), adanya KAK (Kerangka Acuan Kerja), dan diadakan pelatihan

pembuatan RAB. Sedangkan pada faktor regulasi adalah adanya kebijakan penyerapan anggaran, diadakan sosialisasi mengenai mekanisme pencairan anggaran, dan adanya kebijakan yang mengatur penerbitan SK. Kemudian pada faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu adanya pelatihan rutin untuk pejabat pelaksana anggaran, adanya komitmen dari pejabat pelaksana anggaran, dan adanya sanksi bagi pejabat yang tidak menyelesaikan tugas tepat waktu (2) Hasil analisis melalui AHP maka kriteria faktor regulasi sebagai prioritas utama yang perlu diperhatikan dalam strategi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Prioritas selanjutnya adalah kriteria faktor perencanaan anggaran dan ditempat terakhir merupakan faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun alternatif program guna strategi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu diadakan sosialisasi mengenai mekanisme pencairan anggaran merupakan alternatif program prioritas pertama. Selanjutnya yaitu adanya RAB (Rencana Anggaran Biaya) serta adanya kebijakan penyerapan anggaran..

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. (2012). Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2016. Jawa Tengah.
- Badan Kepegawaian Daerah. (2016). Profil PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Jawa Tengah.
- Baskaran, Thushyanthan, et al. 2017. Revenue decentralization, central oversight and the political budget cycle: Evidence from Israel. *European Journal of Political Economy*, Volume 42, March 2016, Pages 1-16
- Berita Jateng. (2016). Pemprov Jateng Pilih Hati-Hati Dalam Penyaluran Hibah dan Bansos. <https://m.beritajateng.net/berita/2016/07/28/pemprov-jateng-pilih-hati-hati-dalam-penyaluran-hibah-dan-bansos/>. (diakses tanggal 9 Agustus 2017)
- Bisnis. (2015). Soal Dana Hibah, Kemendagri Minta Masukan Pemprov Jateng. <https://m.bisnis.com/berita/2015/07/27/soal-dana-hibah-kemendagri-minta-masukan-pemprov-jateng/>. (diakses tanggal 9 Agustus 2017)
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. Jakarta.
- Kotera, Go and Keisuke Okada, 2017. How does democratization affect the composition of government expenditure?. *Journal of Economic Behavior & Organization*, Volume 137, Pages 145-159.
- Nicholas, Jean-Pierre and NicolasPelé. 2017. Measuring trends in household expenditures for daily mobility. The case in Lyon, France, between 1995 and 2015. *Transport Policy*, Volume 59, Pages 82-92
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos).
- Pujiati, Amin. (2008). Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 13 No. 2. Hlm 61-70 Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Rozai, Muhrom A., & Lilik Subagiyo. (2015). Optimalisasi Penyerapan Anggaran dalam Rangka Pencapaian Kinerja Organisasi (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Boyolali). *Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia*, Volume 9 No. 1. Hlm 72-89 Boyolali: Inspektorat Kabupaten Boyolali.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah..